



Judul : Desa di Brasil Tak Cocok Jadi Acuan
Tanggal : Minggu, 26 Agustus 2012
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Desa di Brasil Tak Cocok Jadi Acuan

JAKARTA – Publik kembali mengkritik DPR. Kali ini lantaran Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa DPR melakukan kunjungan kerja ke Brasil untuk studi banding. Pasalnya, negara tersebut dinilai tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan semua anggota Pansus RUU Desa yang berangkat ke Brasil terlalu naif karena melakukan studi banding ke negara yang dimilainya tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

“Anggota DPR tidak perlu jauh-jauh untuk mempelajari

desa. Salah jika mereka berangkat ke sana (Brasil),” kata dia saat dihubungi *SINDO* kemarin.

Pansus RUU Desa DPR telah terbang ke negara di Benua Amerika bagian selatan itu sejak kemarin, 26 Agustus 2012 hingga 1 September 2012 mendatang. Ada 13 anggota Pansus

RUU Desa yang berangkat ke Brasil.

Secara demografis, menurut Sudir, desa-desa di Brasil sangat tidak cocok dan tidak bisa dijadikan acuan. Mulai dari pranata hukum hingga sosial, desa-desa di Brasil tidak bisa diadopsi. Pihaknya melihat desa-desa di Indonesia lebih berdaulat secara sosial.

Di samping itu, Sudir mengungkapkan, secara historis eksistensi desa di Indonesia lebih dulu muncul dibandingkan desa-desa di Brasil sehingga tidak tepat jika dalam menyusun RUU Desa harus mencari perbandingan dengan negara tersebut.

“Justru lebih baik mende-ngarkan aspirasi dari bawah. Brasil tidak ada manfaatnya. Kondisi demografis di Amerika Latin tidak sama dengan Indonesia. Tapi saya berpesan, walaupun harus berangkat, yang perlu dipelajari di sana adalah mengadopsi sistem ekonomi desa. Jadi fokus saja di sana,” tegasnya.

Kritikan yang sama juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menilai perilaku hemat sepertinya sudah jauh dari para anggota DPR. Tahun ini Fitra mencatat anggaran un-

tuk kunjungan kerja DPR mengalami kenaikan hingga Rp3,4 miliar.

“Alokasi anggaran kunjungan pelesiran DPR pada tahun 2012 sebesar Rp140 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja luar negeri. Naiknya alokasi anggaran kunjungan pelesiran anggota Dewan untuk tahun 2012 ini disebabkan setiap pembentukan atau pembahasan RUU rata-rata dipatok Rp3,2 miliar,” bebarnya.

Sementara itu, Ketua Rom-bongan Kunker Pansus RUU Desa ke Brasil Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, pihaknya nanti akan bertemu de-

ngan Kementerian Dalam Negeri Brasil. Di samping itu, rombongan akan bertemu dengan pejabat Kota Brasilia.

Pertemuan tersebut, menurut dia, untuk mende-ngarkan dan mempelajari Kemen-dagri Brasil dalam mengatur hubungan serta pengelolaan desa. Pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke kampung-kampung di daerah Iguacu.

Ditanya soal apa hal spesifik yang bisa dicontoh dari berbagai desa di daerah Iguacu tersebut, Budiman menjawab bahwa itu hanya daerah perdesaan saja. Menurutnya, berbagai daerah itu sebelumnya sudah

dianjurkan untuk didatangi Pemerintah Brasil. Sementara daerah di Kota Brasilia itu adalah kampung-kampung yang diatur dalam yurisdiksi semacam daerah khusus ibukota.

“Kami juga akan bertemu dengan DPR Brasil yang mengurus persoalan *home affairs* (komisi yang berurusan dengan daerah dan desa) seperti tugas Komisi II DPR di Indonesia. Setelah itu, Pansus tentu akan membuat laporan studi banding ini secara terbuka ke masyarakat melalui *website* DPR dan kalau perlu akan kita kirim ke media-media,” tegas dia.

● radi saputro